

PERDAGANGAN OPIUM DI KARESIDENAN JEPARA TAHUN 1870-1932

Oleh : Abdul Anzis Nugroho, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Aziznuge@gmail.com

Abstrak:

Opium merupakan salah satu jenis narkotika yang berasal dari getah buah candu *Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum* yang belum matang. Pada tahun 1870 opium menjadi salah satu komoditi utama bagi pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Jawa, karena itulah Pemerintah Kolonial melakukan monopoli terhadap perdagangan impor opium. Pembatasan impor opium dan memberikan harga jual yang mahal, menimbulkan banyak kongsi-kongsi dagang atau para pedagang ilegal (penyelundup opium) bermunculan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan pengaruh Karesidenan Jepara terhadap perdagangan opium pada masa kolonial dari tahun 1870 sampai 1932.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Karesidenan Jepara yang berbatasan langsung dengan Pelabuhan Semarang dan Rembang membuat wilayah Jepara memiliki peran yang cukup aktif dalam perdagangan opium di Jawa pada masa itu. Hal tersebut dikarenakan oleh longgarnya pengawasan dari Pemerintah Kolonial dan harga yang sangat mahal membuat praktek perdagangan opium ilegal di wilayah pesisir Jawa menjadi hal yang wajar. Bahkan sejak tahun 1870 tercatat wilayah Karesidenan Jepara, yaitu Juwana menjadi pusat dari penyelundupan opium mentah yang datang dari Bali. Pada tahun 1880 tercatat puluhan kapal kecil tertangkap sedang melakukan perdagangan opium mentah, sebanyak 31 kapal-kapal tersebut membawa penumpang Tionghoa yang berasal dari Karesidenan Jepara.

Kata Kunci: *Perdagangan, Opium, Jepara*

TRADE OF OPIUM IN JEPARA CARESIDENE YEAR 1870-1932

Abstract

Opium is one kind of narcotics type derived from the opaque fruit of Papaver somniferum L. or P. paeoniflorum which is immature. In 1870 opium became one of the main commodities for the colonial government of the Netherlands Indies in Java, that was why the Colonial Government monopolized the import trade of opium. Restrictions on the import of opium and provide expensive selling prices, led to many trade partnership companies or illegal traders (opium smugglers) popping up. The purpose of this study is to determine the role and influence of the Jepara Residency on the opium trade in the colonial period from 1870 to 1932.

The results of this study indicate that the Jepara Residency region which was directly adjacent to the Semarang and Rembang Ports made the Jepara region had a quite active role in the opium trade in Java at that time. This was because by loosening of supervision from the Colonial Government and very expensive price made the practice of illegal opium trade in the coastal areas of Java look usual. In fact, since 1870 the Jepara Residency region was recorded, namely Juwana being the center of smuggling of raw opium coming from Bali. In 1880 dozens of small vessels were caught carrying out a trade in raw opium, as many as 31 of these ships carried Chinese passengers from the Jepara Residency.

Keywords: *Trade, Opium, Jepara*

PENDAHULUAN

Opium merupakan salah satu jenis narkotika yang berasal dari getah buah candu *Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum* yang belum matang.¹ Pada tahun 1596 saat orang-orang Belanda pertama kali mendarat di Jawa, opium sudah menjadi bagian penting bagi perdagangan regional pada waktu itu. *Papaver Somniferum* atau bunga opium merupakan tumbuhan yang tidak ditanam di Jawa dengan skala besar, hal tersebut dikarenakan iklim, ketinggian dan tanah yang tidak memungkinkan untuk menanam tanaman ini.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membawa masuk opium ke Nusantara melalui pedagang swasta Belanda di Levant, yaitu saat diadakannya pelelangan di Calcuta atau memperoleh dari agen-agen di British Singapore. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kemudian membawanya masuk ke Jawa terutama ke gudang-gudang opium di Batavia, Semarang, dan Surabaya.² Pada tahun 1811 Inggris berhasil menaklukkan Hindia Belanda sehingga kekuasaan di Jawa dikuasai Inggris di bawah pimpinan Gubernur Letnan Thomas Stamford Raffles.³ Ketika Raffles berkuasa ada sebuah wacana untuk menghapus perdagangan opium di Nusantara, hal tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari opium sangat buruk untuk masyarakat. Namun hal tersebut ditentang dan tidak disetujui oleh pimpinan Raffles di Calcuta.⁴

Kekuasaan Inggris di Nusantara hanya berlangsung sebentar hal tersebut terjadi karena Napoleon mengalami kekalahan terhadap Belanda di Waterloo pada tahun 1816. Hal tersebut tentu membuat pemerintah Hindia Belanda kembali berkuasa di

Nusantara. Masuknya pemerintah Hindia Belanda membuat pengaruh opium semakin besar di kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kalangan para bangsawan yang memandang opium sebagai bagian keramah-tamahan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di pesta-pesta kalangan atas para tamu pria disugahi opium. Pengaruh opium semakin terlihat ketika sebuah laporan, ketika Perang Jawa berlangsung 1825-1830 para prajurit Pangeran Diponegoro banyak yang jatuh sakit ketika pasokan opium terganggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh opium khususnya di Jawa sangatlah besar. Berakhirnya Perang Jawa dan dimenangkan oleh pihak Pemerintah Hindia Belanda, maka kekuasaan mereka semakin besar dan hampir meliputi seluruh pulau Jawa.⁵

Bandar-bandar opium membagi opium menjadi dua jenis, yaitu Cako dan Cakat. Cako adalah jenis opium yang cara konsumsinya dengan cara dihisap secara langsung dengan pipa opium. Sedangkan Cakat adalah jenis opium yang berasal dari Turki dan kualitasnya lebih rendah dari Cako. Biasanya oleh para pekerja opium jenis Cakat ini di campur dengan sirup gula, dan daun awar-awar yang sudah di rajang halus dan opium jenis ini disebut dengan Tike. Opium yang telah dicampur dengan daun awar-awar ini atau yang disebut jenis Tike, jenis opium inilah yang sering di konsumsi oleh orang-orang Jawa.⁶

Orang-orang di Karesidenan Jepara mengkonsumsi opium dengan berbagai cara tergantung selera masyarakat tersebut. Masyarakat kalangan menengah ke bawah lebih sering mengkonsumsi opium jenis Tike yang telah disulin dan ditambah campuran penguat rasa. Orang-orang kalangan atas atau bangsawan biasanya menggunakan opium jenis Cako dengan pipa dan campuran penguat rasa kualitas tinggi. Kebiasaan lain dari orang Jawa adalah menyeduh kopi kemudian di tambah dengan serbuk opium.

Karesidenan Jepara adalah salah satu bagian dari *Afdeling* atau Kabupaten yang di

¹ T. Hema, *Ensklopedia Kesehatan*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka), hlm. 145

² James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, Pecandu 1860-1910*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 69.

³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008), hlm. 248-249.

⁴ Asmi Rahayu, "Perdagangan Candu di Jawa Akhir Abad XIX Awal Abad XX", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2002), hlm. 4

⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm.248.

⁶ Oryza Aditama, "Alur Perdagangan Opium di Karesidenan Semarang Pada Akhir Abad XIX", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), hlm.2-3.

bentuk Pangreh Praja pada masa Kolonial.⁷ Wilayah yang termasuk kedalam Karesidenan Jepara adalah Jepara, Juwana, Kudus dan Pati.⁸ Penikmat candu tersebar ke berbagai kalangan baik masih muda, tua, pejabat maupun petani biasa yang kemudian meluas di Jawa khususnya Jawa Tengah dan termasuk wilayah Karesidenan Jepara. Pada golongan ekonomi atas candu dikonsumsi sebagai gaya hidup yang disuguhkan sebagai tanda kehormatan bagi tetamu di rumah para bangsawan Jawa dan Cina (Tionghoa). Pada masyarakat lainnya yaitu masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga menjadi pecandu, meskipun kebanyakan mengonsumsi candu kualitas rendah.

Pada abad tahun 1860-1890 wilayah Jawa terutama daerah-daerah Karesidenan Jepara seperti Jepara, Juwana, Pati, dan daerah sekitarnya menjadi pusat perdagangan opium. Hal tersebut disebabkan pada saat itu opium adalah salah satu komoditi utama bagi pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Jawa, karena itulah Pemerintah Kolonial melakukan monopoli terhadap perdagangan impor opium. Tujuan dilakukannya monopoli ini adalah untuk membatasi opium yang tersedia di pasaran, sehingga harga opium di pasaran akan melonjak naik sehingga mendorong pajak yang tinggi. Karena itulah kemudian muncul istilah *Opium pacht* (pacht opium) yang merupakan kesepakatan monopoli atas penjualan opium. *Pacht Opium* sendiri diberikan kepada pihak yang telah menjalin perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk menjual opium.

Kebijakan dari pemerintah Kolonial Belanda yang membatasi jumlah pemasukan opium ke Nusantara pada tahun 1872, memicu munculnya para saudagar gelap yang memasukkan opium secara ilegal ke Nusantara. Apalagi dengan harga opium yang relatif lebih murah harganya, jika dibanding dengan harga dari pemerintah kolonial. Kebijakan yang lemah dan bentuk geografis pulau Jawa yang memanjang dan rentan tentu

hal itu membuat para saudagar opium gelap semakin berkembang dengan pesat di Jawa.⁹

Perdagangan opium di kawasan Karesidenan Jepara memiliki peran yang cukup besar bagi pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Hal tersebut tidak terlepas dari Jawa yang pada waktu itu menjadi satu-satunya pulau dibawah kolonialisme Belanda yang menjual opium di bawah monopoli pemerintah. Opium didatangkan dari semua koloni Eropa dan kawasan sekitar, dan kemudian dijual kepada pembeli-pembeli di Asia yang menjadi jajahan Prancis, Inggris dan Spanyol. Penjualan atau perdagangan opium ini melalui bandar tataniaga yang pada umumnya dikelola oleh orang-orang Cina yang memegang *Pacht Opium*. Selain itu sejak akhir abad ke-19 terjadi penyelundupan opium secara besar di Karesidenan Jepara terutama di wilayah Juwana-Rembang, dan pesisir Jepara.¹⁰ Hal sebaliknya terjadi dikawasan pesisir selatan yang tercatat lebih sedikit dalam menerima opium ilegal ini.

Opium masuk melalui pantai pesisir utara Pulau Jawa dimulai dari pelabuhan Batavia lalu dibawa masuk ke daerah pedalaman sekitarnya termasuk dalam hal ini Banten Priangan yang telah melarang penjualan Opium. Sedangkan di Jawa Tengah masuk melalui pesisir Jepara-Rembang dan Juwana-Lasem yang nanti akan diselundupkan kembali ke wilayah pedalaman lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah sebuah metode penelitian dan penulisan sejarah yang disertai dengan cara, prosedur, ataupun teknik sistematik yang sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.¹¹ Metode penelitian sejarah menurut Abdurrahman adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil dalam

⁷ James R. Rush, *op.cit.*, hlm. 19.

⁸ Zayana Sifa, "Pengaruh Perkebunan Tebu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Karesidenan Jepara 1830-1870", dalam <http://journal.student.uny.ac.id/pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

⁹ James R. Rush, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), hlm. 138.

¹⁰ James R. Rush, *op.cit.*, hlm. 78.

¹¹ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 27.

bentuk tulisan.¹² Menurut Kuntowijoyo dalam merumuskan metode penelitian sejarah terdapat lima tahap yaitu pemilishan topik, heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi.¹³ Sedangkan dalam peraturan yang telah ditentukan program studi ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Pertama, heuristik yang merupakan langkah awal dalam mengumpulkan sumber sejarah yang mendukung. Kedua, Kritik sumber berarti usaha meneliti keaslian atau kesejatan sumber-sumber, baik bentuk maupun isinya sehingga benar-benar merupakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, interpretasi yang berarti menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisa fakta akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Terakhir adalah historiografi proses penulisan atau penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Ekonomi Karesidenan Jepara Sebelum Tahun 1870.

Kondisi sosial ekonomi di Karesidenan Jepara sendiri sebelum tahun 1870 dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan besar, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Pribumi. Pengelompokan masyarakat tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, bahkan ada sebuah peraturan yang melarang orang-orang pribumi memakai pakaian yang sama seperti yang dikenakan para bangsawan Eropa.¹⁴

¹² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999), hlm. 43-44.

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng, 1999), hlm. 90.

¹⁴ R.P. Suyono, *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 88.

Dominasi golongan Eropa bukan hanya pada struktur sosial saja tapi juga ke sistem pemerintah daerah, dimana para bangsawan Eropa menempati posisi tertinggi dan orang-orang pribumi menjadi bawahan mereka. Orang-orang Belanda menempati posisi yang strategis baik itu di struktur pemerintahan ataupun sistem sosial masyarakat. Mereka menempati posisi-posisi penting di Departemen Pemerintah, Pimpinan dan Pemilik Perusahaan Perkebunan, Hakim di Pengadilan Negeri Rendah, dan Pengadilan Tinggi, dan banyak posisi penting lain yang dikuasai oleh orang-orang Belanda.

Dominasi golongan Eropa bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat saja tapi juga sampai ke pemerintahan desa. Kehadiran para pejabat Eropa di tingkat desa menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan masyarakat pribumi telah dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Pegawai pemerintah Kolonial terdiri dari dua sistem, yaitu Pegawai Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari para Pejabat Belanda (*Binnenlands Bestuur*) dan pegawai pribumi atau Pangreh Praja (*Indlands Bestuur*) yang terdiri dari para bupati dan para pejabat yang berada di bawahnya. Para Pangreh Praja diangkat oleh Pemerintah Belanda untuk memimpin penduduk pribumi, sehingga pola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui perantara penguasa lokal.¹⁵

Pada tahun 1870 seperti di wilayah lain, kekuasaan tertinggi di Karesidenan Jepara dipegang oleh orang Belanda yang berperan sebagai Residen. Karesidenan Jepara memiliki empat Kabupaten atau *Afdeeling*, yaitu Kab. Jepara, Kab. Juana, Kab. Pati, dan Kab. Kudus. Residen yang memimpin di Karesidenan Jepara adalah yaitu Jhr. Mr. D.C.A. van Hegendorp. Masing-masing *Afdelling* atau Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, diantaranya Raden Adhipati Ario Tjitro Somo sebagai Bupati Jepara, Raden Toemenggoong Ardjo Negoro sebagai Bupati Kudus, Raden Toemenggoong Mangkoedhi Poero sebagai Bupati Juana,

¹⁵ James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, Pecandu 1860-1910*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 19.

sedangkan Bupati Pati tidak diketahui namanya.¹⁶

Luas Karesidenan Jepara adalah 199.688,53 dan terdiri dari 4 kabupaten dan 16 distrik. Ke-16 distrik tersebut antara lain Jepara, Mayong, Banjarnegara, Kudus, Cendone, Undakan, Pati, Cengkol Sewu, Angkatan, Glongong, Bogorame, Selowesi, Tenggelas, Mergotuhu, Juwana, dan Mantop. Secara politik kekuasaan berpusat pada Gubernur Jenderal di Batavia yang di bantu Dewan Hindia yang bertindak sebagai kabinet yang membawahi berbagai departemen di bawahnya. Semua posisi penting daerah kekuasaan Belanda di pegang dan dikendalikan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda.¹⁷ Hal tersebut tentu dimaksudkan agar pemerintah Kolonial Belanda dapat dengan mudah mengatur semua wilayah yang mereka kuasai.

Tabel 1
Tabel Pertumbuhan Penduduk Distrik
(Kawedanaan) di Karesidenan Jepara
Tahun 1865-1900

Distrik	1865	1880	1890	1900	Rata-rata
Kab. Pati	231.359	311.457	364.326	383.821	1,1
Kab. Juwana	114.916	146.459	164.987	171.698	1,7
Kab. Kudus	112.200	159.115	175.255	193.602	1,6
Kab. Jepara	128.238	206.129	217.727	233.305	1,8
Total	586.713	823.160	922.925	982.426	1,4

¹⁶ Zayana Sifa, "Pengaruh Perkebunan Tebu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Karesidenan Jepara 1830-1870", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm.36.

¹⁷ Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Sistem Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 227.

Sumber: Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*, Jakarta: PT Grasindo, 1998. Hlm. 366.

Selain Golongan bangsa Eropa, di Karesidenan Jepara juga terdapat para Golongan pendatang dari Cina maupun Arab. Penduduk etnis Arab lebih banyak menduduki wilayah yang bernama Kauman, sedangkan etnis Cina banyak menempati wilayah Pecinan. Hal lain yang membuat orang-orang Cina dan Arab banyak menetap di wilayah pesisir utara pulau Jawa termasuk di Karesidenan Jepara adalah faktor kondisi wilayah di pantai utara Jawa yang lebih mudah dan strategis untuk melakukan perdagangan ke pedalaman Jawa.¹⁸

Kampung Kauman sendiri adalah sebuah kampung yang berisikan orang-orang yang terbentuk berdasarkan silsilah keturunan atau pertalian darah dan ikatan agama Islam. Berdirinya masjid dan adanya ikatan agama telah mendukung masyarakat Kauman menjadi masyarakat Islam yang taat. Sehingga norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat kauman adalah norma agama.¹⁹

Masyarakat Pecinan pada dasarnya terbentuk karena 2 faktor yaitu faktor politik dan faktor sosial. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menetapkan peraturan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel* yaitu sebuah aturan yang mengharuskan adanya surat ijin bagi orang Cina ketika mau bepergian keluar pemukiman mereka.²⁰ Faktor politik berupa peraturan pemerintah lokal yang mengharuskan masyarakat Tionghoa dikonsentrasikan di wilayah-wilayah ataupun ke kampung-

¹⁸ Denny Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.134.

¹⁹ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Menengok Identitas Kampung Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 16.

²⁰ Onghokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina Sejarah Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 57.

kampung supaya lebih mudah diatur (*Wijkenstelsel*).²¹

Hal ini banyak kita temukan pada zaman Hindia Belanda karena pemerintah kolonial melakukan segregasi berdasarkan latar belakang rasial. Segregasi adalah perbedaan tempat tinggal yang didasarkan oleh warna kulit yang dibuat pemerintah kolonial bertujuan untuk memisahkan masing-masing ras dengan tujuan mempermudah mengontrol mereka dan menghindari konflik.²² Di waktu-waktu tertentu, malah diperlukan izin masuk atau keluar dari pecinan (*Passenstelsel*) semisal di pecinan Batavia. Faktor sosial berupa keinginan sendiri masyarakat Tionghoa untuk hidup berkelompok karena adanya perasaan aman dan dapat saling bantu-membantu.

Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Jepara adalah kota yang terbuka kepada setiap kebudayaan adalah adanya akulturasi budaya di dalam seni ukir di Jepara. Seni ukir sendiri diperkenalkan oleh Tjie Hwio Gwan yang membuat hiasan ukiran di dinding Masjid Astana Mantingan. Tjie Hwio Gwan adalah mertua dari Ratu Kalinyamat, penguasa Karesidenan Jepara sebelum Kolonial Belanda berkuasa di Jepara, ia yang mengajarkan keahlian seni ukir kepada penduduk di Jepara. Pada pemerintahan Ratu Kalinyamat, seni ukir semakin berkembang dengan pesat. Kemudian pada masa kolonialisasi Belanda abad ke-16, produksi ukir Jepara mengalami pembaruan gaya seni baik dari China, India, Arab, Eropa Barat dan gaya asli Indonesia.

Perkembangan Industri Ukir Jepara paling pesat terjadi ketika R.A. Kartini mempromosikan produk industri kerajinan Jepara ke seluruh penjuru dunia. Sebagai putri dari R.M Adipati Ario Sostroningrat, Bupati Jepara periode tahun 1881, Kartini mempunyai peluang untuk memperkenalkan ukiran-ukiran Jepara ke luar negeri. Melalui teman-temannya di Belanda, RA Kartini mengirim karya seni ukir yang berfungsi sebagai produk cendramata ukiran kayu berupa : Peti jahit,

Tempat amplop, dan barang-barang hisan berukir lainnya.²³

Mayoritas penduduk Karesidenan Jepara selain bermata pencarian sebagai nelayan mereka juga bermata pencaharian sebagai petani. Kebanyakan masyarakat di Karesidenan Jepara adalah petani musiman ketika musim hujan mereka akan menanam padi, dan ketika kemarau datang mereka akan menanam padi gadu atau jagung, jarak, kapas dan palawija lainnya.

Kepemilikan tanah di Karesidenan Jepara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanah komunal dan sawah asli. Tanah komunal merupakan bentuk kepemilikan tanah oleh seseorang yang dapat memanfaatkan tanah tersebut secara bergilir atau bergantian dengan warga lain.

Jenis tanah ini tidak boleh dijual dan di pindahtangankan. Kemudian jenis tanah yang kedua, adalah tanah asli merupakan tanah yang dimiliki karena dibuka sendiri, tanah tukon atau tanah yang dimiliki karena dibeli, dan tanah turuntemurun. Bentuk penguasaan tanah asli ini dikenal penduduk Karesidenan Jepara sebagai tanah yoso, yasa, atau yasan.²⁴ Selain itu anggota-anggota pemerintah di setiap desa mendapat sawah jabatan dari pembagian sawah ulayat. Kepala desa menerima 1/10 bagian dari tanah-tanah ulayat, kamitua 2³/4 bau, kebayakan masing-masing 2¹/4 bau, pewarisan tanah dan jual beli tanah pun hanya diperbolehkan kepada sesama orang-orang desa.²⁵

Beberapa hasil perkebunan penting yang di hasilkan di Jawa adalah gula, kopi, tembakau, teh, karet, kina, dan kelapa. Dalam periode tahun 1890-1932, gula menjadi komoditi yang paling diminati di pasaran.

²³ Ran Habbibah, "Wood Carving Promotion And Information Center Di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo Jepara", dalam <http://eprints.ums.ac.id.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

²⁴ Zayana Sifa, "Pengaruh Perkebunan Tebu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Karesidenan Jepara 1830-1870", dalam <http://journal.student.uny.ac.id/pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

²⁵ Taufik Abdullah, *op.cit.*, hlm. 189-190.

²¹ Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 96-97.

²² Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 94.

Wilayah Karesidenan Jepara terutama wilayah Gunung Muria sampai Juwana menjadi salah satu pusat perkebunan tebu. Hal tersebut dikarenakan pantai utara pulau Jawa memiliki sistem pengairan sawah yang sangat baik sehingga mendukung perkebunan tebu di wilayah tersebut.²⁶

B. Perdagangan Opium di Karesidenan Jepara

Sistem *Pach Opium* merupakan sistem perdagangan opium yang dibuat oleh Daendels pada tahun 1808 untuk menggantikan sistem Amfioen Directie yang merupakan badan administrasi khusus yang dibuat untuk mengurus masalah opium.²⁷

Sistem *Pach Opium* sendiri adalah sebuah sistem perdagangan opium dengan cara melelang hak dagang opium untuk di borong oleh pihak dengan penawaran tertinggi. Pihak yang memenangkan pelelangan berhak untuk menguasai dan memperjual belikan opium secara bebas ke para pedagang opium eceran di bawah mereka. Pada tanggal 25 September 1836 di sepakati sebuah perjanjian tentang jatah pengiriman opium perbulan kepada setiap Karesidenan, Kabupaten dan Distrik di Jawa yang telah diatur oleh pemerintah sebagai berikut;

Tabel 2
Tabel Intensitas Pengiriman Opium dari Pusat ke setiap Karesidenan, Kabupaten dan Distrik di Jawa pada Tahun 1836

Daftar Ketentuan Opium Pada Setiap Residen, Kabupaten, dan Distri di Jawa yang di Tentukan Pemerintah	
Pada Bagian yang Pertama	470 katti perbulan
Residen Cirebon	80 katti perbulan
Residen Tegal	110 katti perbulan
Residen Pekalongan	80 katti perbulan
Residen Kedu	220 katti perbulan

²⁶ R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella, Yuda B. Tangkilisan, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 65.

²⁷ Asmi Rahayu, "Perdagangan Candu di Jawa Akhir Abad XIX Awal Abad XX", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2002), hlm. 24.

Residen Semarang dan Kota Semarang dan Ungaran	150 katti perbulan
Kabupaten Demak dan Purwadadi dan Grobogan	110 katti perbulan
Distrik Salatiga dan Tenkeer	35 katti perbulan
Distrik Ambarawa	45 katti perbulan
Kabupaten Kendal	40 katti perbulan
Residen Soerakarta	440 katti perbulan
Residen Djogjakarta	290 katti perbulan
Residen Baglen	210 katti perbulan
Residen Banyumas	90 katti perbulan
Residen Madiun dan Asisten Residen Patjitan	160 katti perbulan
Residen Kediri	190 katti perbulan
Residen Jepara	140 katti perbulan
Residen Rembang	130 katti perbulan
Residen Soerabaya	320 katti perbulan
Residen Pasoeroean	120 katti perbulan
Residen Bezoeki	60 katti perbulan

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris Semarang no. 3112, berisi tentang Soerat perdjanjian beja Apioen

Sistem *Pach Opium* ini sempat mengalami beberapa kali perubahan peraturan, seperti penambahan masa pemborongan yang awalnya hanya satu tahun menjadi tiga tahun, dan juga memperluas wilayah daerah sewa *Pach Opium* dari hanya satu karesidenan menjadi tiga Karesidenan.

Setelah semua opium tersebut terkirim pemerintah akan memberikan hak pembagian dan penjualan kepada pemegang *Pach Opium* di setiap daerah tersebut. *Pach Opium* memiliki wewenang untuk membagi banyaknya opium yang di jual di pasaran baik berupa jumlah barang, maupun jenis opium yang didapatkan boleh tiap bandar opium.²⁸ Dalam waktu delapan hari para *Pachter* harus memberikan laporan kepada pemerintah Kolonial tentang penjualan opium mereka. Setelah opium tersebut dibagi maka pemegang *pach* tersebut harus melaporkan kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tentang

²⁸ Ada dua jenis opium yang dijual di Kolonialisme Belanda yaitu jenis Opium Bengala dan Opium Turki.

hasil penjualannya dengan batas waktu paling lama adalah delapan hari dari penjualan.

Pelelangan opium di Jepara biasanya diadakan di pendapa kediaman seorang bupati senior, di pendapa itu akan berkumpul para pembesar Karesidenan, para bupati dan pejabat-pejabat kecil lainnya. Para tamu yang datang menggunakan pakaian yang mewah sebagai simbol kekuasaan mereka. Residen sendiri hadir sebagai wakil dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang memimpin acara lelang tersebut.

Ketika acara pelelangan dimulai seorang juru tulis akan membacakan syarat-syarat atau peraturan yang berlaku dalam acara lelang tersebut. Selain dibacakan syarat dan peraturan, juru tulis juga akan membacakan batas-batas wilayah kerja *pach opium*, besaran opium yang akan diberikan oleh pemerintah bagi pengepak yang memenangkan lelang, serta membacakan toko-toko opium yang berdagang di wilayah tersebut. Hal lain yang dibacakan adalah peraturan bagi para penawar di larang melakukan penyuapan, penipuan, dan kecurangan.²⁹

Pihak yang memegang pak opium sendiri disebut juga sebagai "pengepak". Dalam kesepakatan *Pach Opium* ini pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberikan kesepakatan untuk menjual opium di berbagai wilayah, seperti kota, distrik atau provinsi yang telah disepakati dalam jangka waktu yang disepakati pula. Jawa sendiri pada abad ke-19 *Pacht Opium* dipegang para saudagar Tionghoa yang telah membayar mahal untuk memperoleh *Pacht Opium* dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Golongan Tionghoa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang diakui oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial hanya memberikan golongan Tionghoa sebagai etnis-rasial yang hanya memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Hal tersebut tentu tidak diterima dan tidak diakui oleh sebagian masyarakat pribumi.³⁰

Regi opium merupakan departemen yang dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada masa politik etis yang

bertujuan untuk mengontrol perdagangan opium di Jawa. Dengan dibentuknya Regi opium maka sistem *Pach Opium* dihapuskan, sehingga semua urusan yang berhubungan dengan opium di pusatkan di Batavia. Sistem Regi opium juga membuat ditutupnya gudang-gudang opium swasta yang dulu bebas berdagang, dan sebagai gantinya maka di setiap wilayah dibentuk sebuah organisasi birokrasi opium yang dipimpin oleh pejabat setempat untuk mengurus perdagangan opium.

Opium sendiri diproduksi oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan jenis Tike dengan rasa dan kualitas yang beragam.³¹ Sistem Regi Opium ini bagi pemerintah Kolonial Belanda dianggap lebih menguntungkan, hal tersebut dikarenakan dari sistem Regi Opium ini pemerintah lebih memiliki peran langsung terhadap perdagangan opium tanpa harus melibatkan para *pachter opium*.³² Terlebih dengan adanya sistem Regi Opium ini semua bentuk perdagangan opium di pusatkan di Batavia.

Regi Opium pertama didirikan di Batavia pada tahun 1893, pimpinan dari Regi opium di Batavia adalah J.Haak yang dibantu oleh beberapa insinyur dan ahli kimia. Pada tahun pertama ini, J.Haak ditugaskan untuk menemukan resep opium yang sesuai dengan cita rasa yang diinginkan oleh konsumen. Selaian hal tersebut, J.Haak juga menciptakan sebuah penanda kimia netral yang diciptakan untuk membedakan opium ilegal dan legal, mesin-mesin itu beroperasi secara otomatis ke dalam tube-tube timah kecil yang berukuran mulai dari 0,5 sampai 50 mata, kemudian tube itu ditutup dan memberikan cap pada kemasan-kemasan tersebut dengan memberi nama dan cap.³³

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membuat sebuah pabrik besar di luar Batavia pada tahun 1901 untuk mengatasi perdagangan opium di seluruh Jawa. Pabrik ini kemudian memproduksi opium secara besar-besaran, dan memperkejakan ratusan warga pribumi, tercatat sebanyak 630 pribumi yang bekerja

³¹ James R. Rush, *op.cit.*, hlm. 230

³² Narti, *Perdagangan Candu di Jawa Tahun 1920-1930*. Lembaran Sejarah. Vol. 2 No. 1, 1999. Hal. 32-33

³³ James R. Rush, *op.cit.*, hlm. 231

²⁹ James R. Rush, *op.cit.*, hlm. 45-46.

³⁰ Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 81.

disana pada tahun 1905 dan 1000 orang pada tahun 1913. Pabrik ini sendiri menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Hindia Belanda pada masa politik etis, bahkan banyak tamu yang datang dari Belanda ditunjukkan teknologi yang berkembang disana. Regi opium sebelum dipasarkan lebih luas ke wilayah Karesidenan yang lebih kecil, para pejabat dan pegawai berkonsultasi dengan para pengepak dan pedagang opium mengenai permintaan dan penawaran, lokasi terbaik untuk toko penjualan opium dan masalah keamanan.

Salah satu pasal yang berusaha dilaksanakan dengan tegas di Karesidenan Jepara adalah Pasal 47 Undang-Undang Dasar (Regeerings Reglement) yang berisi tentang gubernur jenderal memiliki wewenang untuk mengasingkan musuh-musuh yang dirasa mengancam keamanan dan ketertiban. Ketika sistem Regi opium ini dilaksanakan di Jepara, asisten residen Kawedanan Juwana di Karesidenan Jepara di pegang oleh Charles TeMechelen yang terkenal sangat tegas terhadap peraturan mengenai perdagangan opium di kawasan Karesidenan Jepara dan Rembang.

Pada sistem Regi opium ini, di setiap Karesidenan di pusatkan pada depot opium yang dikelola oleh pemegang depot Eropa dan jaringan kerja luas yang terdiri atas toko opium resmi. Di Karesidenan Jepara Toko Regi ditangani oleh mantri penjualan yang bertanggung jawab penuh atas perdagangan opium di wilayah tersebut. Mantri tersebut mencatat segala transaksi penjualan berdasarkan produk opium dan porsi serta menyerahkan pendapat mereka dalam bentuk uang tunai kepada seorang asisten kolektor Pribumi yang salahsatunya menguasai karesidenan.

Pada sistem Regi Opium ini untuk penyewaan tempat penjual opium harus dengan persetujuan dari Pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut terlihat dari surat persetujuan yang di terbitkan pemerintah kolonial pada tanggal 1 Juni 1932 yang berisi surat persetujuan penjualan opium swasta. Surat tersebut berisi bahwa setelah disetujui maka *Pach* swasta yang disewa dikenakan biaya sewa bulanan sebesar F.20 dengan ketentuan bahwa di bawah keputusan yang jika

dilanggar akan dikenakan denda sesuai pasal yang dilanggar.³⁴

C. DAMPAK PERDAGANGAN OPIUM DI KARESIDEN JEPARA

Pada tahun 1890 Pemerintah Kolonial Belanda mulai melakukan pengawasan terhadap penjualan opium di seluruh Nusantara. Bahkan pemerintah Kolonial mulai membuat aturan penjualan opium ke daerah-daerah penjualan candu dengan menetapkan jenis konsumen Eropa, Pribumi dan Cina dan melarang beberapa golongan masyarakat untuk mengkonsumsi opium yaitu militer, anggota kerajaan, pegawai pemerintah dan orang yang belum berumur 20 tahun.

Makin maraknya perdagangan opium di wilayah Karesidenan Jepara membuat konsumsi opium di wilayah ini semakin besar dan sangat mudah di dapatkan. Opium di konsumsi oleh berbagai macam golongan ekonomi di Jepara, mulai dari bangsawan, pegawai biasa, bahkan oleh para petani. Bahkan oleh para petani opium akan di bagikan kepada setiap pria ketika musim panen telah tiba sebagai perayaan.

Opium dikonsumsi dengan cara di campur dengan berbagai macam bahan racikan agar rasanya semakin kuat. Kebiasaan dari para pengguna opium di Jepara adalah mencampur opium mentah dengan rajangan daun awar-awar kemudian ditambahkan sedikit gula. Sedangkan wadahnya menggunakan daun pepaya ataupun pipa buatan rumah. Selain hal tersebut ada juga yang menggunakan tembakau sebagai campuran opium yang kemudian dilinting dengan daun jagung dibuat seperti cerutu. Namun ada juga yang mencampur bubug opium dengan kopi untuk diseduh sebagai minuman.

Ketika industri perkebunan mengalami kerugian, industri opium secara tidak langsung ikut terkena dampaknya. Ketika panen gagal dan banyak perusahaan tutup pada tahun 1884 membuat banyak pekerja yang terpaksa kehilangan pemasukan utama mereka. Meski

³⁴ Senarai Arsip BPAD Provinsi Jawa Tengah Hoofd Provinciale Waterstaat Midden Java no.515, *berisi Surat mengenai sewa menyewa tempat pembelian opium di Rembang Karesidenan Jepara Rembang tahun 1932.*

krisis sedang melanda kolonial para pedagang opium justru masih tetap bertahan.

Pada mulanya efek dari krisis ekonomi ini tidak terlalu berpengaruh pada perdagangan opium. Namun pada tahun 1887 mulai banyak bandar opium yang diserang kerugian yang membuat banyak pedagang opium mengalami kebangkrutan yang semula ada 2.664 pak opium yang bertahan cuma 876 pak opium. Bahkan sampai tahun 1890 pak pak opium yang beridiri bisa dikatakan dibatasi oleh pemerintah kolonial yang hanya terdapat sekitar 1.000 toko di Jawa.³⁵

Pada tahun 1890 ketika para pedagang opium sedang dilanda krisis, muncul sebuah sistem penjualan opium baru yang disebut dengan sistem perdagangan patungan.³⁶ Sistem perdagangan patungan ini biasanya dilakukan dengan cara menjual opium secara keliling dari pintu ke pintu rumah warga. Banyak bandar lokal yang kemudian mengerjakan para pedagang opium keliling untuk menjajakan produk opium mereka ke desa-desa. Karesidenan Jepara sendiri menurut Charles TeMechelen yang merupakan asisten Kawedanan di Juwana menganggap sistem patungan ini memiliki peran yang cukup penting. Sistem patungan ini menjadi sumber pemasukan utama bagi para pengepak opium.

Jika sistem patungan ini dizinkan maka akan menjadi kabar yang sangat membantu pengepak opium yang sedang dilanda krisis. Hal tersebut dikarenakan sistem patungan ini dirasa lebih menguntungkan selain lebih murah dalam pengoperasiannya dibandingkan jika harus menyewa tempat atau sebuah toko. Sistem patungan ini bisa dikatakan sebagai sistem perdagangan opium yang ilegal, hal tersebut tentu saja membuat beberapa pedagang atau pack opium resmi merasa terancam dengan adanya sistem patungan opium ini.

Terlebih dengan adanya hutang antara *pacter opium* dengan pemerintah kolonial yang sedang dilanda krisis ekonomi, membuat pengawasan terhadap opium ini semakin lenggang. Bagi pemerintah Kolonial sistem perdagangan opium ilegal ini sangatlah merugikan pemerintah Hindia Belanda karena menyebabkan pemasukan kas mereka semakin berkurang.

Keluarnya kebijakan dari pemerintah Kolonial Belanda yang membatasi jumlah pemasukan opium ke Jawa pada sejak tahun 1872, memicu munculnya para saudagar gelap yang memasukkan opium secara ilegal ke Jawa. Apalagi dengan harga opium yang relatif lebih murah harganya, jika dibanding dengan harga dari pemerintah kolonial. Dengan kebijakan yang lemah dan bentuk geografis pulau Jawa yang memanjang dan rentan tentu hal itu membuat para saudagar opium gelap semakin berkembang dengan pesat di Jawa.³⁷

Daerah-daerah peredaran opium juga ditetapkan yaitu daerah terbuka konsumen bebas untuk membeli dan mengkonsumsi opium tanpa lisensi, daerah terbuka untuk perdagangan opium yaitu Batavia, Meester Cornelis, Semarang dan Surabaya. Kemudian daerah lisensi atau pembeli harus mendapatkan ijin untuk membeli candu dan menggunakannya.

Karesidenan Jepara termasuk kedalam wilayah daerah lisensi sehingga masyarakat Jepara yang akan mengkonsumsi candu harus mengajukan surat permohonan kepada kontrolir untuk diberikan ijin. Pemohon ijin penggunaan candu harus mencantumkan penghasilan mereka untuk ditentukan oleh petugas berapa candu yang boleh dikonsumsi dalam sehari sehingga tidak terjadi pemborosan.

Memasuki tahun 1900 pendapatan dari penjualan Opium Regie ini telah menyumbang 15% dari total pendapatan pemerintah Kolonial Belanda. Hingga pada tahun 1920-an yaitu hampir f. 30 Juta melebihi jumlah pendapatan dari ekspor perkebunan Kina. Pendapatan dari opium regie ini banyak membantu keuangan pemerintah Kolonial Belanda pada masa resesi ekonomi, ketika hasil ekspor perkebunan turun 50-60% penjualan opium regie hanya turun 14% sehingga pemerintah Kolonial Belanda banyak tertolong dari politik perdagangan candu ini.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berperan tidak hanya sebagai pusat penyimpanan opium tapi juga bertanggung jawab mengontrol penjual-penjual opium grosiran yang kebanyakan dimiliki oleh saudagar-saudagar Cina yang kaya.

³⁵ James R Rush, *op,cit*, hlm. 192

³⁶ James R. Rush, *op,cit*. hlm. 61.

³⁷ James R Rush, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), hlm. 138.

Dalam sistem ini Belanda menentukan daerah-daerah legal opium. Masyarakat di Jawa dan Madura misalnya memiliki akses tak terbatas. Bersamaan dengan aplikasi aturan baru ini, Belanda juga mengeluarkan kebijakan hukuman dari denda berupa bayaran hingga hukuman mati bagi penjual opium kecil dan pemakai di wilayah ilegal candu atau menyediakan candu tanpa melewati kesepakatan dengan Belanda. Belanda mengendalikan secara penuh keuntungan yang didapat dari perdagangan candu.

Jawa menjadi satu-satunya pulau dibawah Kolonial Belanda yang perdagangan Opium dimonopoli oleh pemerintah, yang kemudian melelangnya kepada syahbandar-syahbandar opium Cina di Jawa. Menurut James R Rush, perdagangan opium di Jawa pada tahun dari 1870 sampai 1910 sangatlah menyengsarakan rakyat. Praktek-praktek peredaran opium semakin meluas di wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah terutama di wilayah Rembang, Jepara, dan Juwana, bahkan pada akhir abad ke-19 perdagangan opium ilegal semakin susah dikendalikan.³⁸

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh TeMechelen selama delapan bulan di Karesidenan Jepara, menunjukkan adanya operasi penyelundupan di wilayah kawedanan dan adanya ketidak efektifnya patroli pantai yang dilakukan oleh angkatan laut Hindia Belanda. Pada akhir abad kesembilanbelas wilayah Karesidenan Jepara mendapat julukan sebagai "corong opium" Jawa. Kongsi-kongsi penyelundupan opium banyak di didirikan di Karesidenan Jepara, mulai Juwana, Rembang, dan Lasem.³⁹ Kemudian dari wilayah Karesidenan Jepara ini opium dikirim ke Blora, ke Surakarta, dan lewat Kudus dan Demak ke Semarang. Sebagian opium tersebut di konsumsi di Karesidenan-karesidenan pelabuhan transit seperti di Semarang dan Surabaya, namun sebagian besar juga masuk ke daerah pedalaman Jawa.⁴⁰

Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Karesidenan Jepara yang mengalami perubahan dimana dulunya mengandalkan

hasil laut sebagai pemasukan utama berubah menjadi penyelundup opium di Jawa. Bahkan sebelum tahun 1890 kapal-kapal kecil milik nelayan di Karesidenan Jepara banyak yang digunakan untuk menyelundupkan penumpang-penumpang Tionghoa yang membawa opium masuk ke Jawa.⁴¹

Perdagangan Opium ilegal di sepanjang pantai utara Jawa, dimulai dari Batavia yang memasok opium ke wilayah Banten yang merupakan daerah terlarang opium. Kemudian di pasisir utara Jawa khususnya Jawa Timur ada Surabaya dan Pasuruan yang menjadi tempat mendaratnya opium sebelum di kirim ke wilayah lainnya. Jumlah terbesar tercatat terjadi kawasan pesisir utara Jawa Tengah, yaitu di pesisir Jepara-Rembang dari Juwana hingga Lasem. Selain hal tersebut perdagangan Opium tidak lepas dari pengaruh para saudagar Tionghoa yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial dalam perdagangan Opium di Jawa.

Peran golongan Tionghoa bagi pemerintah Kolonial Belanda adalah sebagai peranta untuk menghasilkan uang oleh penguasa Kolonial. Tidak heran jika pemerintah kolonial banyak menjual macam *pacht* (hak pengelolaan) seperti jalan tol, candu, rumah gadai, kepada pengusaha Tionghoa.⁴²

Pemerintah Kolonial dan Saudagar Tionghoa tentu menjadi dua pihak yang paling diuntungkan dengan adanya kerjasama diantara keduanya. Sistem perdagangan Opium di monopoli oleh kedua pihak tersebut sehingga keuntungan Pemerintah Kolonial dan Tionghoa sangatlah besar. Apalagi ketika akhir abad ke-19, opium menjadi salah satu pemasukan utama untuk kas Kolonial Belanda. Namun dipihak lain yaitu pribumi terutama kaum buruh perkebunan dan rakyat kalangan menengah kebawah menjadi pihak yang dirugikan, mereka dieksploitasi baik secara materi maupun non-materi.

³⁸ James R Rush, *op.cit.*, hlm. 159.

³⁹ *Ibid*, hlm. 152.

⁴⁰ Asmi Rahayu, *op.cit.*, hlm. 67-68.

⁴¹ James R. Rush, *op.cit.*, hlm. 75.

⁴² Peter Carey, *Orang Cina Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2015), hlm, v

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris Semarang no. 3112, *berisi tentang Soerat perdjanjian beja Apioen.*

Arsip Nasional Republik Indonesia, Algemene Secretary Bt 12 Maret 1894 no. 37, *berisi tentang laporan bebarapa daerah dalam memerangi perdagangan gelap opium.*

Senarai Arsip BPAD Provinsi Jawa Tengah Hoofd Provinciale Waterstaat Midden Java no.514, *berisi Surat mengenai sewa ruang untuk Gudang Opium di Keling Jepara pada tahun 1932.*

Senarai Arsip BPAD Provinsi Jawa Tengah Hoofd Provinciale Waterstaat Midden Java no.515, *berisi Surat mengenai sewa menyewa tempat pembelian opium di Rembang Karesidenan Jepara Rembang tahun 1932.*

Senarai Arsip BPAD Provinsi Jawa Tengah Hoofd Provinciale Waterstaat Midden Java no.516, *berisi tentang Surat sewa menyewa tempat dan tempat pembelian opium di Jepara tahun 1932.*

Senarai Arsip BPAD Provinsi Jawa Tengah Tweede Waterstaat Te Semarang no.3092, *berisi tentang surat jual beli Opium di Bangsri Jepara tahun 1932.*

Buku :

Abdul. Rahman Hamid, *“Sejarah Maritim Indonesia”*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Ahmad Adaby Darban, *“Sejarah Kauman: Menengok Identitas Kampung Muhammadiyah”*, Yogyakarta: Tarawang, 2000.

Carey, Peter, *Orang Cina Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2015.

Chusnul Hayati, dkk, *“Peranan Ratu Kalinyamat Di Jepara Pada Abad XVI”*, Jakarta: Departemen Pendidikan, 2000.

Daliman A., *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Denny Lombard, *“Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan I”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *“Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah”*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978.

Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*, Jakarta: PT Grasindo, 1998.

James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, Pecandu 1860-1910*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

_____, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000.

_____, *Jawa Tempo Doeloe 650 Tahun Bertemu Dunia Barat 1330-1985*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

Juliansto Ibrahim, *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *“Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penajajahan di Indonesia 1700-1900”*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Mukhlis Paeni, *“Sejarah Kebudayaan Indonesia Sistem Sosial”*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Kuntowijoyo, *Metode Sejarah: Edisi Kedua*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

_____, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1999.

Leirissa, R.Z., G.A. Ohorella, Yuda B. Tangkilisan, "*Sejarah Perekonomian Indonesia*", Yogyakarta: Ombak, 2012.

Onghokham, "*Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina Sejarah Etnis Cina di Indonesia*", Jakarta: Komunitas Bambu, 2008

_____, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009

Purnawan Basundoro, "*Pengantar Sejarah Kota*", Yogyakarta: Ombak, 2012.

Ricklefs M.C, "*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*", Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008.

Suyono R.P, "*Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial*", Jakarta: Grasindo, 2005.

Internet:

Kumpulan Artikel Sejarah Opium to Java ~ Ketika Jawa Dilamun Candu dalam <https://serbasejarah.wordpress.com/2011/04/18/opium-to-java-ketika-jawa-dilamun-candu/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2017, pukul 08:46 wib.

Ran Habbibah, "*Wood Carving Promotion And Information Center Di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo Jepara*", dalam

<http://eprints.ums.ac.id/21736/2/I.pdf>.

Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

Zayana Sifa, "*Pengaruh Perkebunan Tebu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Karesidenan Jepara 1830-1870*", dalam <http://journal.student.uny.ac.id/pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

Jurnal dan Majalah:

Alamsyah, "*Aktivitas Perdagangan Di Karesidenan Jepara 1843-1891*", PARAMITA. Vol. 25 No.1, 2015.

Narti, "*Perdagangan Candu di Jawa Tahun 1920-1930*", Lembaran Sejarah. Vol. 2 No. 1, 1999.

Skripsi dan Tesis:

Asmi Rahayu, "*Perdagangan Candu di Jawa Akhir Abad XIX Awal Abad XX*", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2002.

Ida Bagus Gede Putra, "*Tradisi Candu Dalam Masyarakat Bali 1839-1938*", Yogyakarta: Tesis S2 UGM, 2000.

Oryza Aditama, "*Alur Perdagangan Opium di Karesidenan Semarang Pada Akhir Abad XIX*", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.

Zayana Sifa, "*Pengaruh Perkebunan Tebu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Karesidenan Jepara 1830-1870*", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.